



REFLEKSI FILOSOFIS TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT TERBUKA: WAWASAN LIBERALISME INDONESIA PERSPEKTIF FRANCIS FUKUYAMA

Marianus Elki Semit^{*1)}

Pius Pandor²⁾

^{1,2} Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang-Jawa Timur-Indonesia

E-mail*: marianuselki@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
<p>Kata Kunci: Kata Kunci 1; Liberalisme, Kata Kunci 2; Masyarakat, Kata Kunci 3; Transformasi, Kata Kunci 4; Integritas</p>	<p>Fokus tulisan ini membahas transformasi menuju masyarakat terbuka di Indonesia melalui perspektif liberalisme menurut Francis Fukuyama. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pemikiran Fukuyama dapat menjadi landasan teoretis bagi perubahan masyarakat Indonesia. Perihal gagasan Fukuyama diharapkan memberikan pandangan kritis terhadap relevansi dan kontribusinya terhadap proses transformasi tersebut. Implementasi liberalisme di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, termasuk kekuasaan pemerintah yang cenderung otoriter dan membatasi kebebasan masyarakat. Kondisi ini memperlambat pergerakan menuju kesejahteraan individu maupun kolektif. Fukuyama menawarkan potensi dampak positif bagi Indonesia, meski harus melalui proses panjang dan menghadapi berbagai hambatan. Transformasi ini menuntut tindakan nyata untuk membangun negara yang lebih terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai deliberatif. Tulisan ini menggunakan metode tinjauan kepustakaan untuk menganalisis relevansi dan implikasi gagasan Fukuyama dalam konteks Indonesia. Pemetaan analisis transformasi menuju masyarakat terbuka serta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan potensi perubahan tersebut demi masa depan Indonesia yang lebih baik.</p>

Abstract

Keywords:

Keyword 1; Liberalism,
Keyword 2; Society,
Keyword 3; Transformasi,
Keyword 4; Integrity

This paper focuses on the transformation toward an open society in Indonesia through the lens of liberalism as articulated by Francis Fukuyama. The study aims to explore the extent to which Fukuyama's ideas can serve as a theoretical foundation for societal change in Indonesia. Fukuyama's concepts are expected to provide critical insights into their relevance and contributions to this transformation process. The implementation of liberalism in Indonesia faces significant challenges, including a government that tends to be authoritarian and restricts societal freedoms. These conditions hinder progress toward individual and collective well-being. Nonetheless, Fukuyama's ideas offer the potential for positive impacts on Indonesia, albeit through a long and challenging process. This transformation requires concrete actions to build a more open nation that upholds deliberative values. This study employs a literature review methodology to analyze the relevance and implications of Fukuyama's ideas in the Indonesian context. It maps the analysis of the transformation toward an open society and provides recommendations for optimizing the potential for such changes, aiming for a better future for Indonesia.

PENDAHULUAN

Zaman sekarang masyarakat Indonesia tengah mengalami pengalaman-pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman yang menyedihkan ini berangkat dari ketidakbebasan masyarakat untuk menyampaikan argumennya secara bebas. Semuanya terikat oleh aturan yang membawa masyarakat kepada kekerdilan karena ruang gerak selalu dibatasi (Lestari 2021). Ingin melakukan sesuatu berdasarkan kehendak pribadi walaupun visinya jelas selalu saja harus ada pendasaran hukum yang meresmikan tindakan tersebut. Hal semacam ini yang menghambat masyarakat Indonesia tidak bertumbuh dan berkembang dalam hal akademik dan ekonomi Roky Gerung mengatakan bahwa kebebasan itu dikatakan kebebasan jika individu beritndak sesuai dengan keinginan hatinya tanpa ada tekanan dari pihak lain. Artinya individu mempunyai hak untuk memuji dan membenci tanpa ada tekanan dari pihak lain. fondasinya ialah mengedepankan nilai-nilai tanggung jawab seorang subyek terhadap argumen yang digagas kepada orang lain (Pandor 2018):

Cendrung terjadi di Indonesia ialah cacat dalam definisi tentang kebebasan. Definisi kebebasan di Indonesia di yang keliru bahwa seseorang individu hanya boleh memuji dan bukan mencaci maki. Hal semacam ini absurd artinya seorang individu telah menerima kosekuensi dari keberadaanya dalam setiap argumennya. Tentunya kita mempunyai kemauan yang sangat besar dalam mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan serta keadilan sebagaimana yang didengungkan seorang politik Amerika John Rawls dalam pertemuan perkulihan filsafat sosial (Pius Pandor 2010). Masyarakat Indonesia terus terikat dengan aturan-aturan negara yang membelenggu masyarakat untuk tidak berkembang menjadi manusia terbuka dengan sesama. Masyarakat terbuka menjadi tujuan yang sangat diidamkan dalam pembangunan sebuah negara, yang bukan hanya mencakup aspek politik dan ekonomi tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan inklusivitas (Kariarta et al. 2020).

Transformasi menuju masyarakat terbuka di Indonesia telah menjadi fokus perdebatan terutama dalam kerangka pandangan liberalisme. Francis Fukuyama, seorang pemikir terkemuka dalam dunia ilmu politik dan filsafat, memberikan wawasan yang berharga terkait dengan peran liberalisme dalam proses transformasi ini (Morisson, 2021). Latar belakang perkembangan pemikiran liberalisme di Indonesia ditilik dari dinamika sosial-politik yang kompleks. Negara yang kaya akan keragaman budaya dan latar belakang sejarah yang unik, Indonesia berada di persimpangan antara tradisi dan modernitas. Pertanyaan mendasar muncul sejauh manakah prinsip-prinsip liberalisme dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat terbuka di Indonesia? (M. Yunus Abu Bakar, 2012). Seiring dengan perkembangan zaman, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, berusaha mencari formula yang tepat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan globalisasi telah membawa tantangan dan peluang yang signifikan.

Data dari *The Economist Intelligence Unit (EIU)* dalam laporan *Democracy Index 2023* menunjukkan bahwa Indonesia berada pada kategori “demokrasi cacat dengan skor 6,3, yang mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek partisipasi politik masyarakat tetapi masih menghadapi kendala pada kebebasan sipil dan budaya politik. Juga laporan *Freedom House* tahun 2023 menempatkan Indonesia sebagai negara “*partly free*” dengan skor kebebasan sebesar 59/100, di mana pembatasan kebebasan berpendapat dan korupsi struktural menjadi isu utama. Penelitian *World Values Survey* pada tahun 2017-2020 juga menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai demokrasi mulai tumbuh, sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki preferensi terhadap stabilitas yang diatur oleh pemerintah kuat, dibandingkan sistem liberal yang memberikan kebebasan individu.

Berpikir bahwa penelitian ini sangat relevan dengan pandangan Fukuyama yang mengfokuskan pada pentingnya institusi yang kuat dan deliberasi politik sebagai fondasi masyarakat terbuka. Penerapan liberalisme di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk resistensi budaya dan struktur kekuasaan yang cenderung otoriter. Realitas mau menunjukkan bahwa perjalanan menuju masyarakat terbuka di Indonesia adalah proses yang memerlukan penguatan institusi demokratis, peningkatan literasi politik, serta perubahan budaya politik agar lebih sejalan dengan nilai-nilai liberalisme seperti kebebasan, kesetaraan, dan deliberasi bijak.

Pandangan Francis Fukuyama tentang liberalisme menawarkan perspektif yang dapat memberikan *illuminatio* atau pencerahan terhadap upaya menuju masyarakat terbuka di Indonesia. Konsep masyarakat terbuka dan liberalisme dalam konteks global bukan sekadar sebagai suatu tren intelektual melainkan sebagai kerangka kerja yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana gagasan liberalisme, sebagaimana dilihat oleh Fukuyama, dapat merambah dan diintegrasikan ke dalam kerangka sosial dan politik Indonesia. Sejarah pemikiran liberal di Indonesia dan analisis terhadap kontribusi pandangan Fukuyama berusaha memberikan sumbangsih dalam memahami dinamika transformasi menuju masyarakat terbuka di tengah perhelatan yang ada (M A Rosyidin, 2023). Implikasi dari pemikiran ini juga dapat membuka diskusi tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan prinsip-prinsip liberalisme untuk mencapai tujuan

pembangunan yang berkelanjutan. Kerangka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih kaya dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap potensi dan hambatan dalam mencapai masyarakat terbuka di Indonesia.

Sejarah Indonesia telah melibatkan diri dalam berbagai perubahan struktural yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial. Transformasi ini bukan hanya menjadi dedikasi pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil, pemangku kepentingan, dan aktor-aktor lainnya yang turut serta dalam merumuskan arah masa depan bangsa. Konsep masyarakat terbuka, yang diartikulasikan dalam wawasan liberalisme, menawarkan suatu paradigma yang menciptakan ruang bagi partisipasi aktif dan perubahan dinamis. Pandangan Francis Fukuyama menyoroti pentingnya lembaga-lembaga liberal dalam menciptakan dan memelihara masyarakat terbuka.

Penulis menyimpulkan sebagai kebaruan dalam tulisan ini bahwa liberalisme merupakan paradigma yang berusaha memaksimalkan potensi individu dalam berbagai aspek kehidupan melalui kebebasan, tetapi keberhasilannya bergantung pada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kritik terhadap pandangan liberalisme klasik, seperti yang diajukan oleh Adam Smith dan Iramdhan Utility, adalah bahwa kebebasan ekonomi tanpa batas sering kali menciptakan kesenjangan sosial. Sebaliknya, Abror Rosyidin memberikan pandangan bahwa kebebasan dalam berpikir dan politik seharusnya tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga menjaga harmoni dalam masyarakat melalui demokrasi.

Oleh karena itu liberalisme tidak boleh dilihat sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif. Keterlibatan aktif masyarakat sipil, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi elemen sentral dalam perspektif liberalisme ini (Riyanto 2023). Pertanyaan kritis muncul, Bagaimana implementasi prinsip-prinsip liberalisme dapat disesuaikan dengan realitas kompleks Indonesia?

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendalami pemahaman tentang transformasi menuju masyarakat terbuka di Indonesia dengan memfokuskan pada perspektif liberalisme menurut pandangan Francis Fukuyama, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan bersama sebagai tujuan dari penulisan ini, yakni; Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana nilai-nilai liberalisme dapat diintegrasikan dalam kebijakan dan dinamika sosial Indonesia, serta bagaimana implementasinya mencerminkan perkembangan arah politik dan sosial negara ini. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang dampak dan relevansi ideologi liberalisme dalam realitas Indonesia.

Kedua, tujuan penulisan ini adalah merinci dan menganalisis pandangan Francis Fukuyama terhadap liberalisme dan sejauh mana pandangan tersebut dapat memberikan panduan atau wawasan bagi transformasi sosial di Indonesia. Kontribusi Fukuyama dalam konteks lokal, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana ideologi liberalisme dapat diadaptasi dan diaplikasikan dalam realitas Indonesia yang unik. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip liberalisme, serta memberikan kontribusi pemikiran dan saran kebijakan untuk mendukung transformasi menuju masyarakat terbuka yang inklusif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan relevan terkait

perkembangan sosial dan politik Indonesia dalam menghadapi era global yang terus berkembang.

Sebagai anak bangsa Indonesia hari demi hari semakin berpikir kritis dalam memajukan tanah air ini yang mengedepankan nilai-nilai delibratif. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan bahwa manusia mampu melihat akan kehadiran liberalisme di Indonesia dari sudut positif. Perihalnya kita dituntut agar tetap bijaksana dengan kehadiran liberalisme dan menggunakan demi kepentingan bersama dan individu sebagaimana yang didengungkan oleh Thomas Hobbes. Harapannya adalah agar tujuan-tujuan penulisan di atas dapat terus mengevaluasi diri dan melihat liberalisme sebagai terobosan baru dalam memajukan negara ini. Fondasi dalam memajukan negara Indonesia tentunya merujuk pada konsep pemikiran dari Francis Fukuyama yang cemerlang sebagai landasan dasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur, yang bertujuan untuk mengeksplorasi konsep filosofis liberalisme dan masyarakat terbuka menurut perspektif Francis Fukuyama, serta menganalisis relevansinya dalam konteks transformasi sosial-politik di Indonesia. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup karya-karya utama Fukuyama seperti *The End of History and the Last Man* ditulis dan diterbitkan pada tahun 1992, *Political Order and Political Decay* ditulis dan diterbitkan pada tahun 2014, *liberalism and It's Discontents* ditulis dan diterbitkan pada tahun 2022. Data sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan analisis ilmiah yang membahas liberalisme di Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deduktif, komparatif, kontekstual-kritis, dan sintesis filosofis. Analisis deduktif digunakan untuk menguraikan gagasan Fukuyama tentang liberalisme dan masyarakat terbuka secara konseptual, sementara analisis komparatif membandingkan pemikiran Fukuyama dengan pemikir lain seperti Adam Smith.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Pemikiran Liberal di Indonesia

Pemikiran liberal memiliki jejak sejarah yang kaya di Indonesia, melibatkan peristiwa-peristiwa yang membentuk landasan ideologisnya. Pemikiran liberal awalnya mulai mendapat pengaruh signifikan pada periode awal pergerakan nasional, terutama di tengah berbagai upaya untuk mengakhiri kolonialisme. Para pemikir seperti Ki Hajar Dewantara dan Soewardi Soerjaningrat, lebih dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara, membawa gagasan-gagasan liberal ke dalam diskusi nasionalis (Iramdhan, 2017). Masa pergerakan kemerdekaan, pemikiran liberal semakin meresap dalam pembentukan dasar negara Konstitusi 1945 mencerminkan semangat liberal dalam menjamin hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan di depan hukum. Periode ini juga melihat adanya ketegangan antara pemikiran liberal dan kekuatan-kekuatan yang lebih otoriter. Pasca-kemerdekaan, pemikiran liberal terus mengalami dinamika yang kompleks seiring perubahan politik dan sosial. Era Orde Baru ditandai dengan kendali politik yang ketat, meskipun sejumlah pemikir liberal tetap bersikeras memperjuangkan hak-hak individu dan kebebasan sipil (Semadi 2019). Reformasi 1998

membuka pintu bagi kembali munculnya pemikiran liberal, dengan semakin jelasnya penekanan pada hak asasi manusia, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat sipil.

Pemikiran liberal kembali mendapatkan momentum, tantangan tetap muncul dalam mengintegrasikan nilai-nilai liberal dengan konteks kultural dan politik Indonesia yang kompleks. Sejarah perkembangan pemikiran liberal di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan konstan, dimana ideologi ini beradaptasi dengan berbagai fase sejarah dan dinamika perubahan sosial di tanah air. Pemikiran liberal di Indonesia mengalami perkembangan yang unik dan dinamis sepanjang sejarah perjuangan nasional. Awal pergerakan nasional, pemikiran liberal mulai mencuat sebagai respons terhadap dominasi kolonial dan sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem politik yang merugikan masyarakat pribumi. Ki Hajar Dewantara, yang lebih dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara, adalah salah satu tokoh yang menyuarakan ideologi liberal dalam konteks pendidikan dan pergerakan nasional (Kariarta et al. 2020). Pendidikan karakter juga sangat perlu diterapkan semaksimal mungkin di Indonesia alasan mendasar membentuk individu masyarakat Indonesia agar mampu mengenal etika dalam kehidupan bersama (Budi et al. 2023).

Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, semangat liberalisme semakin tercermin dalam pembentukan konstitusi yang menegaskan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan prinsip-prinsip demokrasi. Periode berikutnya, terutama selama Era Orde Baru, menyaksikan kendali politik yang ketat dan pembatasan terhadap kebebasan sipil. Meskipun demikian, sejumlah intelektual dan aktivis tetap gigih mempertahankan nilai-nilai liberal dan memperjuangkan hak-hak individu. Awal Reformasi tahun 1998, Indonesia menyaksikan kebangkitan kembali pemikiran liberal, dengan penekanan pada hak asasi manusia, transparansi, dan partisipasi masyarakat sipil (Ningsih 2009). Tantangan muncul dalam mengintegrasikan nilai-nilai liberal dengan realitas kultural dan politik Indonesia yang beragam. Sejarah perkembangan pemikiran liberal di Indonesia bukan hanya mencerminkan perjalanan ideologis, tetapi juga menggambarkan ketegangan dan adaptasi yang terus-menerus dalam mencari keseimbangan antara kebebasan individu dan konteks sosial yang kompleks. Zaman yang terus berubah pemikiran liberal pun di Indonesia terus mengalami evolusi, menciptakan lanskap ideologis yang beragam dan relevan.

Implementasi Prinsip Liberalisme dalam Kebijakan Nasional

Implementasi prinsip-prinsip liberalisme dalam kebijakan nasional Indonesia merupakan dinamika kompleks yang tercermin dalam berbagai fase sejarah dan perubahan politik. Sejak awal kemerdekaan, semangat liberalisme mencuat dalam konstitusi 1945, yang menegaskan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan pemerintahan yang demokratis. Implementasi prinsip-prinsip ini seringkali menghadapi tantangan dan keterbatasan, terutama selama periode Orde Baru di mana kebebasan sipil ditekan. Pada era Reformasi tahun 1998, terdapat upaya signifikan untuk menerapkan prinsip-prinsip liberal dalam kebijakan nasional (Wattimena 2016). Undang-Undang Dasar 1945 direvisi untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan sistem politik yang lebih demokratis. Pembukaan ruang untuk kebebasan pers dan partisipasi aktif masyarakat sipil menandai perubahan signifikan dalam dinamika politik Indonesia.

Implementasi prinsip liberalisme tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul dalam menyesuaikan prinsip-prinsip liberal dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Indonesia yang beragam. Kendala ekonomi, ketidaksetaraan, dan berbagai aspek budaya lokal sering menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi ini. Selain itu, terdapat ketegangan antara nilai-nilai liberal dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Konteks kebijakan nasional mengespresikan sejauh mana prinsip-prinsip liberalisme tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai liberal. Analisis ini akan memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas implementasi prinsip liberal dalam konteks kebijakan nasional Indonesia.

Upaya implementasi prinsip-prinsip liberalisme dalam kebijakan nasional Indonesia membentuk narasi dinamis yang melibatkan pergeseran ideologis dan politik. Sejak masa awal kemerdekaan, semangat liberalisme tercermin dalam konstitusi 1945 yang secara tegas mengakui hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan prinsip-prinsip demokratis. Implementasi ini diwarnai oleh tantangan yang muncul selama Era Orde Baru, di mana kebebasan sipil dan hak-hak individu dibatasi. Reformasi meletus pada tahun 1998, terjadi perubahan yang signifikan dalam upaya untuk mempraktikkan prinsip-prinsip liberal dalam kebijakan nasional. Revisi Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pijakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak asasi manusia, mendukung kebebasan pers, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses politik. Perjalanan implementasi prinsip liberalisme masih diwarnai oleh berbagai dinamika dan konflik kepentingan.

Implementasi prinsip liberalisme dalam kebijakan nasional Indonesia menghadapi tantangan berupa penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik unik masyarakat Indonesia yang beragam. Aspek-aspek ekonomi, sosial, dan budaya menjadi faktor yang mempengaruhi keseimbangan antara nilai-nilai liberal dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas. Ketidaksetaraan, korupsi, dan tantangan ekonomi juga menjadi hambatan dalam memastikan implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip liberal (Wibowo et al. 2022). Analisis mendalam terhadap kebijakan nasional yang telah diimplementasikan di berbagai sektor akan memberikan gambaran yang lebih kaya tentang dinamika dan tantangan implementasi prinsip liberalisme. Pemahaman ini akan memberikan wawasan penting dalam mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai liberal dapat menciptakan dampak positif dalam pembentukan kebijakan nasional di Indonesia serta mengidentifikasi solusi untuk mengatasi hambatan yang mungkin.

Pandangan Fukuyama tentang Liberalisme

Francis Fukuyama, seorang cendekiawan politik terkemuka, menyuguhkan pandangan yang kaya dan mendalam tentang liberalisme, khususnya dalam konteks perubahan global dan dinamika politik di berbagai negara. Menurut Fukuyama, liberalisme bukan hanya sebuah sistem politik, tetapi juga merupakan suatu bentuk evolusi politik dan intelektual yang mendalam. Pandangan Fukuyama tentang liberalisme mencakup konsep “akhir sejarah”, yang menjadi fokus perhatian dalam karyanya yang terkenal (Wiratraman 2007). Fukuyama berpendapat bahwa dengan runtuhnya Blok Timur dan keberhasilan demokrasi liberal,

terutama di Amerika Serikat, akhir sejarah ditandai oleh dominasi ideologi liberal sebagai bentuk pemerintahan yang paling tinggi. Perlu dicatat bahwa konsep “akhir sejarah” ini bukanlah klaim bahwa tidak akan ada peristiwa atau konflik di masa depan, melainkan bahwa ideologi liberal telah mencapai tingkat dominasi tertinggi dalam perdebatan ideologis.

Fukuyama menggambarkan liberalisme sebagai sistem yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti kebebasan individu, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia. Pandangan ini dihubungkan dengan keberhasilan liberalisme dalam memberikan kerangka bagi perkembangan ekonomi yang dinamis dan pemerintahan yang terbuka. Esensi liberalisme adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kemampuan untuk menciptakan masyarakat yang adil. Fukuyama menyoroti tantangan yang dihadapi oleh liberalisme, termasuk ketidaksetaraan ekonomi yang dapat merusak stabilitas politik dan sosial (Origins et al. 2011). Pandangan Fukuyama tentang liberalisme tidak bersifat dogmatis; sebaliknya, Fukuyama menciptakan dasar untuk refleksi kritis dan evolusi konstan dalam mewujudkan prinsip-prinsip liberal dalam konteks dunia yang terus berubah.

Pandangan Fukuyama tentang liberalisme juga menyoroti pentingnya lembaga-lembaga liberal, seperti *rule of law* dan demokrasi representatif, dalam mencapai masyarakat yang adil. Beliau menekankan bahwa meskipun terdapat kekurangan dalam implementasi liberalisme, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan untuk mengatasi berbagai tantangan global. Fukuyama menunjukkan bahwa keberhasilan liberalisme bukanlah suatu jaminan tetapi suatu hasil dari perjuangan dan pemeliharaan nilai-nilai inti (Hardiman 2018). Pandangannya, liberalisme tidak hanya mencakup dimensi politik, melainkan juga dimensi etika yang menggarisbawahi pentingnya integritas, keadilan, dan toleransi. Pendekatan holistik ini memberikan sudut pandang yang mendalam terhadap relevansi liberalisme dalam konteks global, termasuk bagaimana nilai-nilai ini dapat diadaptasi dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Pandangan Fukuyama bukan sekadar memberikan evaluasi kritis terhadap kondisi global, tetapi juga memberikan arah bagi pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip liberalisme dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat yang tengah bertransformasi (Fukuyama 2022).

Kontribusi Gagasan Fukuyama terhadap Konteks Indonesia

Gagasan-gagasan yang diusung oleh Francis Fukuyama, terutama terkait dengan liberalisme dan konsep “akhir sejarah”, memberikan kontribusi signifikan dalam merangkul perubahan dan transformasi di berbagai konteks global, termasuk di Indonesia. Salah satu kontribusi utama Fukuyama adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang potensi nilai-nilai liberal untuk membentuk masyarakat yang inklusif dan demokratis (Pandor 2014). Pandangan Fukuyama tentang akhir sejarah, kendati kontroversial, memberikan dasar pemikiran bahwa liberalisme memiliki keunggulan dan dapat menjadi model pemerintahan yang paling sesuai dengan tuntutan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Dinamika sosial dan politik Indonesia, pemikiran ini dapat memberikan perspektif yang relevan dan menginspirasi tentang arah perubahan yang diinginkan.

Gagasan Fukuyama juga menggambarkan pentingnya membangun lembaga-lembaga liberal yang kuat. Konteks Indonesia di mana penguatan lembaga-lembaga demokratis

menjadi suatu kebutuhan mendesak, kontribusi Fukuyama dalam hal ini dapat memberikan arahan tentang bagaimana membangun fondasi institusional yang solid untuk mendukung perkembangan masyarakat terbuka. Nilai-nilai etika yang ditekankan oleh Fukuyama, seperti integritas dan keadilan, dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan di Indonesia (Hardiman 2018). Kontribusi Fukuyama dalam menghubungkan prinsip-prinsip liberalisme dengan aspek etika membuka peluang untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai universal dan realitas budaya lokal.

Penelitian ini mempertimbangkan tantangan dan kritik terhadap gagasan Fukuyama, terutama ketika diterapkan dalam konteks yang beragam seperti Indonesia. Hal ini mengundang pertanyaan tentang sejauh mana konsep-konsep tersebut dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara efektif, mempertimbangkan kekayaan budaya dan keunikan sosial-politik Indonesia. menganalisis kontribusi Fukuyama terhadap konteks Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menggali peluang dan hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai liberalisme, serta mengevaluasi relevansi dan aplikabilitas gagasan tersebut dalam mencapai tujuan transformasi menuju masyarakat terbuka di Indonesia.

Sejarah Liberalisme Masuk Ke Indonesia Dan Perkembangnya

Liberalisme ke-19 memasuki Indonesia seiring dengan kolonialisme Belanda yang menduduki sebagian besar wilayah tersebut. Belanda, sebagai kekuatan kolonial, membawa konsep-konsep liberalisme sebagai bagian dari perubahan administratif dan ekonomi yang mereka terapkan di Indonesia. Proses ini mencakup pembentukan struktur ekonomi kapitalis yang lebih terbuka dan peliberalan perdagangan (Madung 2017). Liberalisme ekonomi Belanda memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi di koloni, meskipun seringkali menguntungkan pihak kolonial Belanda dan hanya memberikan sedikit keuntungan bagi masyarakat pribumi. Edukasi yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda juga memainkan peran penting dalam penyebaran ideologi liberal di kalangan elit lokal. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda menjadi wahana untuk memperkenalkan nilai-nilai liberal kepada kalangan terdidik di Indonesia. Literatur-literatur dari Eropa, terutama Belanda, menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Indonesia yang semakin terbuka terhadap pemikiran liberal.

Pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, muncul gerakan pers dan pencerahan yang membela kebebasan berpendapat dan hak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Tokoh-tokoh seperti Kartini, seorang pejuang emansipasi wanita, terinspirasi oleh nilai-nilai liberal dalam upaya mereka memperjuangkan hak-hak individu dan emansipasi wanita. Selain itu, nilai-nilai liberal juga mewarnai gerakan perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia, di mana tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Mohammad Hatta mencampurkan nilai-nilai liberal dengan semangat nasionalisme dalam perjuangan melawan penjajahan. Kemerdekaan Indonesia, pemikiran liberal tetap relevan dalam pembentukan identitas politik negara (Jones 2013). Partai Nasional Indonesia (PNI), yang didirikan oleh Soekarno dan Hatta, meskipun tidak murni liberal, mencakup elemen-elemen liberal dalam visi politiknya. Pemikiran liberal juga terus memengaruhi arah kebijakan

ekonomi Indonesia pada masa modern, khususnya dalam konteks dukungan terhadap pasar bebas dan investasi asing (Pandor 2014).

Perkembangan pemikiran liberal di Indonesia juga mencapai puncaknya dalam gerakan pembebasan nasional. Peran liberalisme dalam pembentukan konsep hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi menjadi penting dalam merumuskan dasar-dasar kemerdekaan. Seiring dengan itu, pengaruh pemikiran liberal semakin meresap ke dalam intelektualitas Indonesia, termasuk dalam kalangan aktivis politik dan tokoh-tokoh nasionalis (Sen 1999). Era modern, pemikiran liberal tetap relevan dan menjadi bagian dari percaturan politik Indonesia. Memang tidak selalu secara eksplisit diakui, elemen-elemen liberal seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi terus menjadi bagian integral dari tatanan politik dan hukum Indonesia. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional yang menganut prinsip-prinsip liberal menggambarkan komitmen negara terhadap nilai-nilai tersebut.

Perlu diakui bahwa liberalisme juga menghadapi tantangan di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat masih merasa skeptis terhadap nilai-nilai liberal, menganggapnya sebagai produk Barat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dan norma lokal. Hal ini menciptakan dinamika sosial dan politik yang kompleks, dimana terdapat perdebatan dan pergeseran dalam interpretasi dan penerapan nilai-nilai liberal dalam konteks Indonesia. Wacana politik kontemporer diruang publik, pergeseran ideologis dan munculnya berbagai pandangan alternatif juga menciptakan tantangan tersendiri bagi pemikiran liberal. Perjalanan sejarah liberalisme di Indonesia menunjukkan bahwa pemikiran ini tidak hanya sekadar dipahami sebagai warisan kolonial, tetapi juga telah diadaptasi dan menjadi bagian integral dari perjalanan panjang menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas politik Indonesia.

Dampak Positif dan Negatif Eksistensi Liberalisme Di Indonesia

Dampak positif eksistensi liberalisme di Indonesia terlihat dalam perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Liberalisme telah memberikan dasar bagi sistem politik yang lebih terbuka dan inklusif, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Kebebasan pers dan ekspresi juga merupakan dampak positif, memberikan ruang bagi pluralitas pandangan dan pertumbuhan masyarakat sipil yang aktif (Haryatmoko 2010). Pengaruh liberalisme, Indonesia telah berhasil menjalankan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil, menciptakan mekanisme demokratis untuk mengakomodasi beragam kepentingan politik.

Dampak positif tersebut seringkali bersanding dengan dampak negatif, seperti ketegangan sosial dan krisis identitas. Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia merasa bahwa nilai-nilai liberalisme bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan tradisional. Hal ini dapat menciptakan ketegangan budaya dan sosial, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti hak LGBT dan kebijakan keluarga berencana. Munculnya konflik ideologis antara pandangan liberal dan konservatif dapat mengakibatkan polarisasi masyarakat (Pattipeilohy and Wijaya 2018). Sektor ekonomi dampak positif eksistensi liberalisme tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kebijakan ekonomi liberal, seperti peliberalan perdagangan dan investasi asing, telah meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dampak

negatifnya adalah ketidaksetaraan ekonomi yang semakin membesar. Kesempatan ekonomi yang lebih besar cenderung menguntungkan kelompok kaya, sedangkan kelompok miskin masih menghadapi tantangan aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan.

Eksistensi liberalisme di Indonesia perlu diketahui telah mengalami perdebatan dan resistensi dari berbagai kelompok mengkritik pemikiran liberal sebagai barang impor yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menciptakan dinamika kompleks antara modernitas dan tradisi, dimana eksistensi liberalisme perlu diadaptasi untuk menghormati keberagaman budaya dan agama di Indonesia (Basuki 2012). Dampak positif eksistensi liberalism di Indonesia dihadapkan pada tugas untuk menyeimbangkan nilai-nilai liberal dengan konteks lokal. Dialog dan kompromi diperlukan untuk menciptakan ruang bagi berbagai pandangan tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan budaya. Seiring waktu, mengintegrasikan nilai-nilai liberal dalam kerangka yang sesuai dengan keunikan dan keberagaman Indonesia akan menjadi penting.

Relevansi Dan Sumbangsih Konsep Pemikiran Francis Fukuyama Di Indonesia

Konteks Indonesia tentunya pemikiran Francis Fukuyama menjadi fondasi yang perlu dihidupi di “tanah air” ini. Perihal terkait dengan konsep berpikrinya tentang demokrasi liberalisme yang nota bene lebih mengarahkan kepada kesejahteraan bersama dan tidak menyimpan egoisme yang tinggi. Francis Fukuyama, seorang ilmuwan politik dan ekonom ternama, memiliki relevansi yang signifikan di Indonesia, terutama terkait dengan konsep akhir sejarah yang diutarakan dalam karyanya *The End of History and the Last Man*. Fukuyama mengemukakan bahwa dengan runtuhnya Blok Timur pada akhir Perang Dingin, ideologi liberal-demokrasi kapitalis menjadi paradigma paling dominan dan mewakili titik puncak evolusi politik manusia (Raymond Geuss, 2002). Di Indonesia pemikiran ini menjadi relevan seiring dengan transisi demokratisasi yang dimulai pada akhir Orde Baru.

Awal tahun 1998 Indonesia mengalami reformasi politik yang menggulingkan rezim otoriter Soeharto dan membuka jalan bagi demokrasi. Fukuyama melihat transisi ini sebagai bagian dari perubahan global menuju sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai liberal-demokrasi (Fukuyama 2007). Implementasinya tidak selalu berjalan mulus, gagasan tentang akhir sejarah yang mencakup dominasi ideologi liberal-demokrasi tetap memberikan kerangka pemahaman terhadap dinamika politik pasca-Orde Baru di Indonesia. Perlu diakui bahwa konsep Fukuyama juga dihadapkan pada kritik. Beberapa menganggapnya terlalu optimis dan menyederhanakan kompleksitas perkembangan politik global (Roring 2018). Kritik terhadap penerapan demokrasi liberal dan ketidaksetaraan yang terus berlanjut menunjukkan bahwa di Indonesia realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan pandangan Fukuyama (Frans Magnis-Suseno 2015). Justru pemikiran Fukuyama memberikan pandangan konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis tantangan dan perubahan dalam sistem politik Indonesia.

Fukuyama juga mengemukakan pembentukan identitas dan pengakuan dalam pembentukan masyarakat yang stabil. Hal ini dapat diterapkan di Indonesia, sebuah negara dengan keberagaman budaya, agama, dan etnis. Proses konsolidasi identitas nasional dan upaya untuk mencapai keseimbangan antara keragaman dan persatuan merupakan tantangan yang relevan di konteks Indonesia, dan pemikiran Fukuyama dapat memberikan perspektif

untuk memahami dinamika ini. Fukuyama menekankan pentingnya lembaga-lembaga liberal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi (Koten 2023). Pemikiran semacam ini dapat diterapkan dalam konteks reformasi ekonomi pasca-krisis moneter 1997-1998, di mana upaya untuk meningkatkan tata kelola ekonomi dan mengurangi korupsi mencerminkan aspirasi untuk memperkuat fondasi ekonomi yang lebih liberal. Intinya secara keseluruhan pemikiran Francis Fukuyama memberikan kontribusi konseptual yang penting dalam memahami perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pasca-Orde Baru (Wibowo et al. 2022). Tentunya tidak semua aspek pemikirannya dapat sepenuhnya diterapkan dengan sempurna, ide-ide tersebut tetap memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis kompleksitas dinamika yang berkembang di Indonesia.

Situasi Masyarakat Indonesia di Tengah Perkembangan Liberalisme

Perkembangan arus global liberalisme dewasa ini masyarakat Indonesia mengalami dinamika kompleks yang mencerminkan pergeseran nilai, norma, dan tatanan sosial. Perkembangan ini tidak hanya tercermin dalam sektor politik, tetapi juga meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah transformasi budaya yang terjadi seiring dengan akses yang semakin meluas terhadap informasi dan teknologi. Masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh budaya global, mengubah pola pikir dan gaya hidup mereka. Hal ini tercermin dalam adopsi nilai-nilai individualisme, pluralisme, dan toleransi yang lebih luas, sejalan dengan prinsip-prinsip liberal. Sektor politik Indonesia juga mengalami perubahan yang signifikan. Reformasi demokratisasi pada akhir Orde Baru, ideologi liberal-demokrasi semakin mengakar dan menjadi dasar bagi sistem politik nasional.

Setiap individu mempunyai hak untuk merdeka dan kebebasan dalam berekspresi demi memperjuangkan *justice and peace*, serta memberantas pelarangan beberapa organisasi tertentu. Di samping kemajuan ini, masih ada tantangan dalam memastikan penerapan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Liberalisasi ekonomi juga memainkan peran penting. Upaya untuk membuka pasar, mereduksi hambatan perdagangan, dan memperkuat lembaga-lembaga ekonomi yang bersifat liberal telah menjadi agenda utama. Masyarakat Indonesia pun juga mengalami dampak globalisasi ekonomi, seperti peningkatan mobilitas tenaga kerja dan integrasi pasar (Prasetyo 2010). Liberalisasi ekonomi dapat memberikan peluang pertumbuhan, tetapi juga menimbulkan ketidaksetaraan yang perlu diatasi agar manfaatnya dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perlu diakui bahwa tidak semua kalangan masyarakat menghadapi perkembangan liberalisme dengan sikap positif. Beberapa kelompok masyarakat, terutama yang lebih konservatif, merasa cemas dengan perubahan nilai dan norma yang cepat. Pertentangan antara pandangan liberal dan konservatif sering muncul, menghasilkan polarisasi dalam masyarakat. Tantangan ini menunjukkan bahwa, sambil memandang liberalisme sebagai suatu kemajuan, perlu adanya dialog dan pendekatan inklusif untuk memastikan bahwa nilai-nilai tradisional yang dihormati dalam budaya Indonesia tetap dihargai dan dijaga (Fukuyama 2014). Oleh karenanya situasi masyarakat Indonesia di tengah perkembangan liberalisme mencerminkan

keseimbangan kompleks antara adaptasi terhadap nilai-nilai global dan pelestarian nilai-nilai lokal. Dinamika ini menunjukkan perlunya pendekatan yang bijaksana dan berimbang dalam mengelola dampak liberalisasi untuk memastikan terciptanya masyarakat sejahtera.

Pentingkah Demokrasi Liberalisme Di Indonesia

Demokrasi liberalisme memiliki peran yang penting dalam konteks Indonesia, dalam membentuk tatanan politik, ekonomi, dan sosial negara. Pertama-tama, demokrasi liberal mendorong prinsip pemerintahan berdasarkan aturan hukum, menjadikannya landasan yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia. Negara Indonesia mengingat akan sejarahnya yang penuh dengan pengalaman otoritarianisme. Demokrasi liberal memberikan kerangka yang mendukung perlindungan hak individu, kebebasan berpendapat, dan hak untuk berserikat secara damai (RIYANTO 2017). Demokrasi liberal membuka ruang untuk partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan (Alois A. Nugroho, 2016). Rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil yang berkualitas dan memengaruhi arah kebijakan negara serta memprioritaskan demokrasi deliberatif sebagaimana yang didengungkan Jurgen Habermas dalam pertemuan kuliah filsafat sosial. Legitimasi pemerintah dan menciptakan iklim politik yang lebih responsif terhadap aspirasi rakyat kembali diperkuat. Demokrasi liberal dalam hal ini memungkinkan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Sektor ekonomi demokrasi liberalisme sangat mendukung prinsip pasar bebas dan perlindungan hak properti. Menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi (Nikodemus and Endi 2023). Seiring dengan globalisasi, demokrasi liberal membantu Indonesia untuk terlibat dalam perdagangan internasional dan berinteraksi dengan komunitas global, membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Arendt 1970). Penting untuk diakui bahwa tantangan tetap ada dalam penerapan demokrasi liberal di Indonesia. Korupsi, ketidaksetaraan, dan tantangan dalam memastikan partisipasi yang merata masih menjadi masalah (Suryanto 2020). Beberapa kalangan juga merasa bahwa demokrasi liberal terkadang mengorbankan nilai-nilai lokal atau bahkan dapat disalahgunakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Lembaga-lembaga demokratis perlu diperkuat dan membangun kesadaran publik tentang pentingnya demokrasi yang berbudi menjadi esensial.

Global development, demokrasi liberal di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan baru, termasuk penyebaran informasi palsu, pengaruh asing, dan dinamika geopolitik yang kompleks. Ketahanan demokrasi perlu diperkuat melalui pendidikan politik dan media yang independen menjadi semakin krusial. Demokrasi liberal secara keseluruhan memiliki relevansi yang signifikan di Indonesia (Arendt 1998). Perlu disadari bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi, demokrasi liberal memberikan kerangka kerja yang mendorong partisipasi warga negara, perlindungan hak asasi manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nilai-nilai lokal dan kondisi unik Indonesia perlu diperhatikan dengan baik, penerapan demokrasi liberal dapat menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya saing di era global ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Negara Indonesia tentang kebebasan tentunya bukan hal yang mudah. Kebebasan itu dikatakan berkualitas dan bernilai di tengah masyarakat apabila mampu menggunakan kebebasan tanpa mengganggu yang lain “manusia”. Manusia Berpikir bahwa dalam perkembangan alat teknologi harus diberi ruang gerak khusus bagi masyarakat supaya tidak terkesan gaya mati. Membahas transformasi menuju masyarakat terbuka dengan fokus pada wawasan liberalisme Indonesia, sebagaimana dipandang oleh Francis Fukuyama. Fukuyama dalam hal ini merumuskan liberalisme sebagai suatu konsep yang tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Pandangannya bahwa masyarakat terbuka terwujud ketika nilai-nilai liberal mampu mengakomodasi atau menyesuaikan keragaman dan memberikan kebebasan kepada individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memperhatikan keutamaan guna menciptakan kesejahteraan individu di tengah masyarakat. Diri sendiri menjadi kunci utama atau fondasi institusional yang kuat dalam membangun *giant of awareness* atau raksasa kesadaran. *Giant of awareness* untuk semakin peka terhadap segala kebutuhan masyarakat. Maka implementasi liberalisme dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan masyarakat terbuka di Indonesia seperti kebebasan, keadilan, dan partisipasi aktif dapat berkembang secara seimbang *hic et nunc*.

REFERENSI

- Arendt, Hannah. 1970. *On Violence*. New York: Harcourt, Brace & World.
- . 1998. *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press,.
- Bakar, M. Yunus Abu. 2012. “Pengaruh Paham Liberalisme Dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Tsaqafah* 8(1): 135.
- Basuki, Udiyo. 2012. “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1(2).
- Budi, Aprilia et al. 2023. “Pemberontakan OPM-KKB Dalam Perspektif Etika Keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre.” *Jurnal Filsafat Indonesia* 6(3): 435–44.
- Frans Magnis-Suseno. 2015. *Etika Politik: Konsep Dasar Moral Politik Dalam Tradisi Filsafat Barat Dan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fukuyama, Francis. 2007. *Sil'noe Gosudarstvo : Upravlenie i Mirovoř Poriadok v XXI Veke*.
- Fukuyama, Francis. 2014. “Political Order and Political Decay Chair: Dr Robin Niblett.” 44(0): 1–8. www.chathamhouse.org.
- . 2022. “El Liberalismo y Sus Desencantados : Cómo Defender y Salvaguardar Nuestras Democracias Liberales.”
- Geuss, Raymond. 2002. “Liberalism and Its Discontents.” *Political Theory* 30(3): 320–38.
- Hardiman, Budi. 2018. *Demokrasi Dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan Dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iramdhan, Iramdhan. 2017. “Paham Nasionalisme Dan Pergerakan Kebangsaan Di Indonesia Dari Tahun 1900-1942.” *Sosio e-kons* 9(1): 46.
- Jones, Sidney. 2013. “Sisi Gelap Reformasi Di Indonesia : Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran 1.” *Nurcholish Madjid Memorial Lecture*: 1–20.
- Kariarta, Wayan et al. 2020. “Filsafat Ketuhanan Menurut Baruch de Spinoza.” *Genta Hredaya* 4(2): 124–34.

- Koten, Yosef Keladu. 2023. "Hannah Arendt Dan Konsep Politik Sebagai Ruang 'Di-Antara' Manusia: Refleksi Untuk Konteks Indonesia." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 14(2): 235–52.
- Madung, Otto Gusti. 2017. *Pluralisme Dan Toleransi Dalam Demokrasi Indonesia*. Malang: STFT Widya Sasana.
- Nikodemus, and Yohanes Endi. 2023. "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7(2): 1224–36.
- Nugroho, Alois A. 2016. *KOMUNIKASI DAN DEMOKRASI*. 5th ed. ed. Widianoro. Yogyakarta: Kanisius.
- Origins, The et al. 2011. "N 1989, Francis Fukuyama Argued In." 27(3).
- Pandor, Pius. 2014. *Politik Uang: Pembusukan Demokrasi Dan Perjuangan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2018. "Fenomenologi Agama A Reté." : 10–28.
- Pattipeilohy, Stella Y. E., and Yahya Wijaya. 2018. "Kajian Teologi Moral Terhadap Fashion Sebagai Isu Budaya Populer." *Jurnal Kawistara* 8(1): 91.
- Pius Pandor. 2010. *Ex Latina Claritas Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*. Jakarta: Obor.
- Prasetyo, Teguh Yuwono. 2010. "Demokrasi Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Politik Kontemporer Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3(14): 297–312.
- RIYANTO, FX. EKO ARMADA. 2017. "'Aku Indonesia, Aku Pancasila' Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruksi Diri." *Seri Filsafat Teologi* 27(26): 59–70.
- Riyanto, Thomas Kadek Lintang Kurniawan dan F.X. Eko Armada. 2023. "Jurnal Reinha." *Jurnal Reinha* 14(1): 35–47.
- Roring, Franky P. 2018. "Retorika Soekarno Dalam komunikasi Internasional Anti Imprealisme Dan Kapitalisme." *Jurnal Oratio Directa* 1(1): 44–62.
- Semadi, Yoga Putra. 2019. "Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter." *Jurnal Filsafat Indonesia* 2(2): 82–89.
- Sen, Amartya. 1999. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Wattimena, Reza A.A. 2016. "Mengurai Ingatan Kolektif Bersama Maurice Halbwachs , Jan Assmann Dan Aleida Assmann Dalam Konteks Peristiwa 65 Di Indonesia." *Studia Philosophicca Et Theologica* 16(2): 164–96.
- Wayne Morisson, penerjemah Khozim. 2021. *Liberalisme Dan Gagasan Masyarakat Yang Adil Pada Akhir Modernitas*. Jakarta: Nusamedia.
- Wibowo, A. Setyo et al. 2022. "Cara Kerja Ilmu Filsafat Dan Filsafat Ilmu: Dari Dialektika Ke Dekonstruksi." : 365.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2007. "Neo-Liberalisme, Good Governance Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal hukum jentera XV* 24(3): 363.